



Pendaftaran Siswa KMS Awali PPDB

Pemkot menjamin siswa KMS di sekolah negeri maupun swasta.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta akan memulai tahapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2016/2017, mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK. PPDB tahun ini diawali dengan pendataan siswa dari keluarga miskin pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS).

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memang memberikan kuota khusus bagi siswa miskin di semua sekolah negeri di wilayah Yogyakarta. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana mengatakan, pemkot telah lama memberikan kuota khusus bagi siswa pemegang KMS ini. Untuk tahun ini, kuota yang diberikan juga sama dengan tahun sebelumnya.

Edy menjelaskan, untuk tingkat SMP, kuota siswa baru dari keluarga pemegang KMS ini disediakan sebesar 25 persen dari total bangku yang tersedia. Sedangkan untuk SMA, kuota untuk siswa dari keluarga tidak mampu ini sebesar lima persen dari total bangku siswa baru, dan untuk SMK sebanyak 25 persen. "Kenapa SMK lebih besar, karena harapannya siswa dari keluarga KMS banyak ke SMK yang menyediakan pendidikan keahlian dan siap masuk lapangan kerja," ujar dia.

Berdasarkan data PPDB 2016/2017, daya tampung 16 SMP negeri di Kota Yogyakarta sebanyak 3.462 siswa baru. Dari jumlah tersebut, 25 persen disediakan untuk siswa pemegang KMS atau 865 bangku. Selebihnya sebanyak 55 persen untuk siswa dalam kota atau 1.905 bangku, dan 20 persen untuk siswa dari luar Kota Yogyakarta atau 692 bangku.

Untuk jenjang menengah atas, daya tampung sebelas SMA negeri di Kota Yogyakarta tahun ini sebanyak 2.720 siswa baru. Dari total jumlah tersebut, sebanyak lima persennya untuk siswa KMS atau 136 bangku. Sedangkan 65 persen untuk siswa non-KMS dalam kota atau 1.768 siswa, dan sisanya sebesar 30 persen untuk siswa yang berasal dari luar Kota Yogyakarta atau 816 bangku.

Sementara daya tampung tujuh SMK negeri di Yogyakarta sebanyak 3.296 siswa baru. Ada

Lanjut

kuota 25 persen atau 824 bangku untuk siswa baru pemegang KMS. Sebanyak 75 persen atau 2.472 bangku disediakan untuk siswa baru non-KMS, baik dari dalam kota maupun siswa asal luar kota. Siswa pemegang KMS ini dijamin biaya pendidikannya oleh Pemkot Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Bukan hanya yang di sekolah negeri, siswa KMS yang diterima di sekolah swasta di mana pun juga bakal diberikan bantuan pendidikan oleh Pemkot.

Ketua Panitia PPDB Kota Yogyakarta Samiyo mengatakan, PPBD tahun ini dilakukan secara online melalui laman *yogya.siap.ppdb.com*. Pendaftaran PPDB online untuk siswa pemegang KMS juga bakal berjalan serentak, baik SMP maupun SMA/SMK. Pendaftaran dimulai pada 9

Juni sampai 16 Juni mendatang. Sedangkan pengumumannya pada 20 Juni. "Kenapa pendaftaran kita barengkan, karena sesuai dengan surat edaran Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) bahwa tahun ajaran baru harus dimulai pekan ketiga Juli. Ini terkait efektivitas kegiatan belajar mengajar," kata dia.

Tahapan pendaftaran untuk siswa KMS ini mendahului pendaftaran siswa reguler. Pendaftaran siswa baru dari program reguler akan dibuka 20-21 Juni untuk jenjang SMP, dan pada 11-24 Juni untuk SMA/SMK.

Kepala UPT JPD Kota Yogyakarta Suyatmi menjelaskan, pendataan siswa KMS di wilayahnya dilakukan di Dinas Pendidikan pada 9-16 Juni mendatang. Pendataan ini akan digunakan sebagai dasar pendaftaran siswa KMS yang dilakukan secara online.

Siswa pemegang KMS yang akan mendaftarkan diri ke UPT JPD ini diminta membawa sejumlah persyaratan. Antara lain, fotokopi kartu ujian, fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau sejenisnya, dan fotokopi KMS yang sudah dilegalisasi kelurahan setempat. Juga harus membawa fotokopi kartu keluarga yang juga dilegalisasi, dan surat rekomendasi penambahan nilai jika ada. "Siswa bisa memilih dua sekolah pilihan untuk SMP dan SMA, dan empat jurusan di dua sekolah atau satu sekolah untuk SMK dalam PPDB ini," ujar dia.

UPT JPD juga menyosialisasikan terkait akses jaminan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin ini ke wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Pasalnya, Suyatmi mengatakan, UPT JPD Kota Yogyakarta pun memberikan jaminan pendidikan bagi siswa miskin warga kota yang bersekolah di luar daerah. "Karenanya, jangan paksakan siswa untuk masuk SMK negeri jika siswa tidak berminat pada jurusannya. Di swasta pun siswa pemegang KMS kami jamin biayanya," kata dia. ●

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005